



BAB VI

KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 adalah pedoman bagi Pemerintah Kota Balikpapan dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bagi Pemerintah Kota Balikpapan, dokumen ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode tersebut. Bagi masyarakat dan *stakeholders*, dokumen ini menjadi pedoman dan rujukan dalam menyatukan gerakan dalam rangka membangun Kota Balikpapan.

Keberhasilan pencapaian pembangunan dapat dicapai apabila didukung dengan (a) Komitmen kepemimpinan daerah; (b) Konsistensi; (c) Kerja keras dan kesungguhan segenap aparat pemerintah; (d) Pelaksanaan *Good Governance*; (e) Keberpihakan kepada rakyat; (f) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta; (g) Kedisiplinan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan bermasyarakat.

Kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Unsur pemerintah, masyarakat serta dunia usaha berkewajiban melaksanakan atau mendukung program-program dalam RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;

2. Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut;
3. Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tersebut;
4. Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RPJPD ini ditetapkan, yang bersifat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran 13 tahun ke depan, maka perubahan situasi tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi perubahan situasi tersebut hanya dapat memperlambat atau mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran. Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan semula.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAUD PIRADE